



Jaminan Kesehatan Tetap Total Coverage

WARGA yang ber-KTP Kota Jogja tidak perlu merasakan kekhawatiran tak lagi mendapatkan jaminan kesehatan. Meski, saat ini pemerintah pusat telah melaksanakan program Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN). Warga ber-KTP Jogja tetap bakal mendapatkan jaminan kesehatan.

Baik itu mereka yang termasuk Keluarga Menuju Sejahtera (KMS)

atau tidak. Jaminan kesehatan bagi warga Kota Jogja tetap bakal menggunakan sistem *total coverage*. Asalkan, bersedia untuk dilayani dengan layanan kelas tiga di penyelenggara

pelayanan kesehatan.

Saat JKN berlaku, Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bagi warga Kota Jogja tetap akan berlaku.

► Baca *Jaminan... Hal 11*

■ JAMINAN...

Sambungan dari hal 1

JKN hanya akan diberikan kepada warga yang selama ini memegang Askes atau mendaftarkan diri sebagai peserta JKN di Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).

Rumah sakit atau Puskesmas juga tetap akan memberikan pelayanan bagi pemegang JKN maupun Jamkesda, dalam hal ini KTP Jogja. Sebab, kami telah sepakat untuk memberikan jaminan kesehatan secara menyeluruh kepada warga Kota Jogja.

Nantinya, warga Kota Jogja yang akan mendapatkan jaminan dari Jamkesda akan dibiayai dengan APBD Kota Jogja dan APBD DIJ. Itu bagi warga pemegang KMS, Jaminan Kesejahteraan Sosial

(Jamkesos) Pemprov DIJ, dan non-KMS atau ber-KTP Jogja.

Sedangkan, untuk pemegang Jaminan Kesejahteraan Masyarakat (Jamkesmas) akan secara otomatis masuk dalam program JKN. Sehingga, layanan bagi seluruh masyarakat tetap akan gratis.

Untuk perubahan dari Jamkesda dan Jamkesos ke JKN, selama dua tahun mendatang. Saat ini, perpindahan itu, sedang kami sosialisasikan kepada masyarakat. Agar mereka nantinya paham ketika harus membayar iuran.

Juga, bagi warga Kota Jogja yang termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau yang nantinya iuran premi dibayar dengan APBD Kota Jogja. Verifikasi PBI ini akan dilakukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Karena itu, warga yang tidak

memegang KMS bakal menjadi prioritas mendapatkan bantuan premi dari pemkot.

Sedangkan bagi warga yang dinilai mampu, tetap diimbau membayar premi secara mandiri. Ini sesuai dengan kelas mereka. Karena, nantinya pemberlakuan pembayaran premi ini sesuai dengan kemampuan masyarakat. Warga yang menentukan sendiri.

Semoga dengan berlakunya JKN ini bukan harus sakit. Doa kita semua pasti akan sehat semua. Tanpa harus menggunakan JKN atau KTP Jogja. Tapi, kalau pun mendapatkan cobaan sakit, tetap bisa kembali sehat, dan produktif kembali untuk berkarya. Semoga.

*Salam Jogja,
Salam Indonesia Jaya.*

*Haryadi Suyuti
dan Imam Priyono*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Jamkesda			

Yogyakarta, 18 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005